



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

# RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

## Tahun 2025





## KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha ESA yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 adalah merupakan dokumen perencanaan awal tahun kedua dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang berpedoman dari hasil evaluasi Renja tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan.

Penyempurnaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 130 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indicator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indicator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

Renja Tahun 2025 merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025. Renja Tahun 2025 yang disusun sebagai bahan penyempurnaan dan diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan dalam mendukung program Pemerintah Daerah.

Kuala Tungkal, Desember 2024

Kepala BKAD  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



**AHMAD JAIS, S.E., M.E**  
Pembina (IV/a)

NIP. 19800701 201001 1 009

## DAFTAR ISI

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Halaman Judul.....                                                       | i         |
| Kata Pengantar.....                                                      | ii        |
| Daftar Isi.....                                                          | iii       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                 |           |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                | 1         |
| 1.2. Landasan Hukum .....                                                | 2         |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....                                             | 3         |
| 1.4 .Sistematika Penulisan.....                                          | 4         |
| <b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>           |           |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD..... | 6         |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....                                | 15        |
| 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....        | 28        |
| 2.4 .Review TerhadapRancangan Awal RKPD.....                             | 28        |
| 2.5 .Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....             | 35        |
| <b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN</b>                                        |           |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....                          | 36        |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....                                 | 36        |
| 3.3. Program dan Kegiatan .....                                          | 37        |
| <b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD .....</b>                     | <b>46</b> |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                | <b>47</b> |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Penyusunan Renja merupakan pelaksanaan dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja BKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan dalam hal sebagai berikut :

1. Renja merupakan dokumen dasar penyusunan program kegiatan OPD/SKPD kedalam KUA dan PPAS serta penyusunan dan perencanaan program kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
2. Renja SKPD juga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

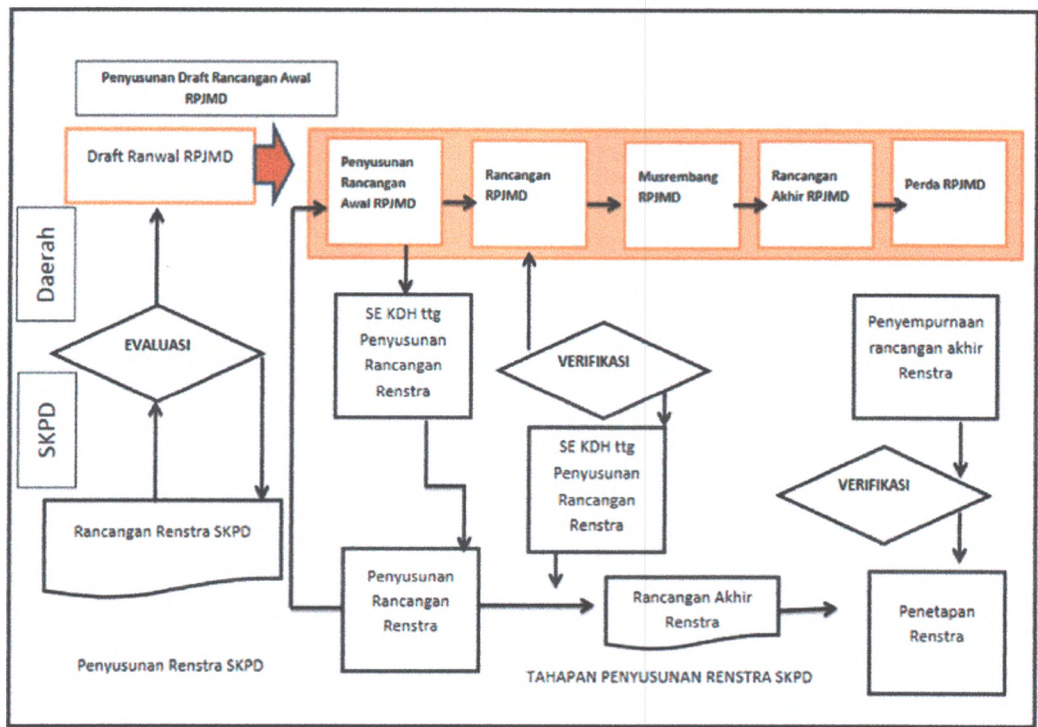
Mengingat pentingnya arti dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dn Rencana Kerja Daerah antara lain :

1. Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah paling lambat minggu pertama bulan Desember.
2. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan



Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah :

Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Reppublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);



4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara *Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah* tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023.
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah .

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja-SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 , antara lain :

1. Memberikan informasi tentang Rencana Program dan Kegiatan tahunan.
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program.
3. Sebagai bahan masukan/landasan dalam menyusun kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025 .

Sedangkan, tujuannya adalah :



1. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. ~~Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan~~ program kegiatan yang ada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyajian Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang.**

Pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD/OPD dengan Renja K/L dan Renja Pro/Kab/Kota dari tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **1.2. Landasan Hukum.**

Penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan.**

Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan.**

Pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta sistem garis besar isi dokumen.

### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.**

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan tahun berjalan (tahun n-1).

#### **2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.**



Kajian terhadap capaian pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Gambaran sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang yang dimiliki serta dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan *mursrembang*.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD**

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumus isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan.

Penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V PENUTUP**



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKAD

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra SKPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. selain mempunyai tugas dan fungsi koordinator dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah juga adalah salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa BKAD selaku SKPKD (dalam hal ini BKAD) mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Memperhatikan ketentuan tersebut, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintahan secara tidak langsung juga mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan representasi agenda utama pembangunan yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan sebagaimana tentang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 yang tertuang dalam visi Bupati Tanjung Jabung Barat yaitu “MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH” dengan misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM yang beriman, berilmu dan berakhlak.
2. Mewujudkan Kondisi sosial yang tentram, tertib dan demokratis.
3. Peningkatan tata kelola Pemerintah yang Baik untuk pelayanan publik.
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah dan pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
5. Pemerataan Pembangunan Daerah dari desa sampai ke kota.



Dan INDIKATOR Program Pembangunan RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat tahun 2025 sebagai berikut:

|     |                                                  |              |
|-----|--------------------------------------------------|--------------|
| 1.  | Indeks Pengembangan Masyarakat (IPM)             | (69,15)      |
| 2.  | Status kabupaten layak anak (KLA)                | (Utama)      |
| 3.  | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                  | (89,50)      |
| 4.  | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                 | (70,50)      |
| 5.  | Indeks pembangunan keluarga                      | (66,68)      |
| 6.  | Nilai persepsi rasa aman                         | (70,50)      |
| 7.  | Indeks Reformasi Birokrasi                       | (54,65)      |
| 8.  | Nilai SAKIP Kabupaten                            | (66,01)      |
| 9.  | Maturitas SPIP                                   | (Level 3)    |
| 10. | Nilai survey kepuasan masyarakat                 | (80,74)      |
| 11. | <b>NILAI OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN</b> | <b>(WTP)</b> |
| 12. | Laju pertumbuhan ekonomi                         | (3,50%)      |
| 13. | Indeks kualitas lingkungan hidup                 | (71,19)      |
| 14. | Indeks Williamson                                | 0,435)       |

Dari uraian tersebut Evaluasi Perencanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra BKAD kab. Tanjung Jabung Barat dapat diuraikan sebagai berikut:



TABEL 2.1  
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH  
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NAMA OPD : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

| KODE | URUSAN/BID. URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH DAN<br>PROGRAM/ KEGIATAN                          | INDIKATOR KINERJA PROGRAM<br>(OUTCOMES)/ KEGIATAN<br>(OUTPUT)                                                                                                                      | TARGET CAPAIAN<br>KINERJA RENSTRA<br>TAHUN 2021-2026 | REALISASI TARGET<br>KINERJA HASIL<br>PROGRAM DAN<br>KELUARAN<br>KEGIATAN S/D<br>TAHUN 2022 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN<br>KEGIATAN TAHUN 2023 |                         |                          | TARGET PROGRAM<br>DAN KEGIATAN<br>RENJA TAHUN 2024 | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN<br>TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN<br>BERJALAN             |                                                          | KETERANGAN |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
|      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                            | TARGET RENJA<br>TAHUN 2023                                      | REALISASI RENJA<br>2023 | TINGKAT<br>REALISASI (%) |                                                    | REALISASI CAPAIAN<br>PROGRAM DAN<br>KEGIATAN S/D<br>TAHUN BERJALAN (<br>TAHUN 2024) | TINGKAT<br>CAPAIAN<br>REALISASI<br>TARGET<br>RENSTRA (%) |            |
| 1    | 2                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                  | 4                                                    | 5                                                                                          | 6                                                               | 7                       | 8=(7/6)                  | 9                                                  | 10 =(5+7+9)                                                                         | 11=(10/4)                                                | 12         |
|      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br/>PEMERINTAHAN DAERAH</b>                                     | Persentase Penyediaan Komponen<br>Penunjang Pelayanan Kantor                                                                                                                       | 600%                                                 | 100%                                                                                       | 100%                                                            | 94,81%                  | 100,00                   | 100%                                               | 310%                                                                                | 52%                                                      |            |
|      | Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | Tingkat pemenuhan dokumen<br>Renstra / Renja / Dpa / Evaluasi<br>Renstra, Renja / Lakip yang disusun<br>dan dilaporkan                                                             | 600%                                                 | 100%                                                                                       | 100%                                                            | 100%                    | 100,00                   | 100%                                               | 347%                                                                                | 58%                                                      |            |
|      | Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                          | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                  | 30 Dokumen                                           | 10 Dokumen                                                                                 | 5 Dokumen                                                       | 5 Dokumen               | 100,00                   | 9 Dokumen                                          | 18 Dokumen                                                                          | 60%                                                      |            |
|      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | 48 Laporan                                           | 16 Laporan                                                                                 | 8 Laporan                                                       | 8 Laporan               | 100,00                   | 7 Laporan                                          | 21 Laporan                                                                          | 44%                                                      |            |
|      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>                                           | Tingkat pemenuhan dokumen<br>Laporan keuangan tahunan OPD                                                                                                                          | 600%                                                 | 100%                                                                                       | 100%                                                            | 100%                    | 100,00                   | 100%                                               | 325,84%                                                                             | 54%                                                      |            |
|      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang Menerima =Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                                                                                                              | 246 orang                                            | 82 Orang                                                                                   | 41 Orang                                                        | 41 Orang                | 100,00                   | 41 orang                                           | 144 Orang/Bulan                                                                     | 58%                                                      |            |
|      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas<br>ASN                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan<br>Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                              | 72 Dokumen                                           | 12 Dokumen                                                                                 | 12 Dokumen                                                      | 12 Dokumen              | 100,00                   | 12 Dokumen                                         | 42 Dokumen                                                                          | 58%                                                      |            |
|      | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan<br>Tanggapan Pemeriksaan                                    | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan<br>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut<br>Pemeriksaan                                                                                                     | 12 Dokumen                                           | -                                                                                          | 2 Dokumen                                                       | 2 Dokumen               | 100,00                   | 2 Dokumen                                          | 2 Dokumen                                                                           | 17%                                                      |            |
|      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat<br/>Daerah</b>                                        | Meningkatnya Disiplin Aparatur                                                                                                                                                     | 600%                                                 | 100%                                                                                       | 100%                                                            | 100%                    | 100%                     | 100%                                               | 200%                                                                                | 33%                                                      |            |
|      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta<br>Atribut Kelengkapannya                                   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya                                                                                                                       | 625 Paket                                            | 180 Paket                                                                                  | 90 Paket                                                        | 90 Paket                | 100,00                   | 90 Paket                                           | 250 Paket                                                                           | 40%                                                      |            |
|      | <b>Administrasi Umum Perangkat<br/>Daerah</b>                                               | Cakupan layanan adm umum OPD<br>meliputi 7 sub kegiatan (bernilai                                                                                                                  | 600%                                                 | 100%                                                                                       | 100%                                                            | 118,47%                 | 118,47                   | 100%                                               | 352%                                                                                | 59%                                                      |            |



| 1 | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                      | 4           | 5           | 6           | 7             | 8=(7/6)       | 9           | 10 =(5+7+9) | 11=(10/4)  | 12 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
|   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 6 Paket     | 1 Paket     | 2 Paket     | 2 Paket       | 100,00        | 2 Paket     | 5 Paket     | 83%        |    |
|   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 24 Paket    | 4 Paket     | 4 Paket     | 4 Paket       | 100,00        | 3 Paket     | 12 Paket    | 50%        |    |
|   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 18 Paket    | 3 Paket     | 2 Paket     | 2 Paket       | 100,00        | 2 Paket     | 12 Paket    | 67%        |    |
|   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 6 Paket     | 1 Paket     | 2 Paket     | 2 Paket       | 100,00        | 1 Paket     | 4 Paket     | 67%        |    |
|   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 72 Dokumen  | 12 Dokumen  | 12 Dokumen  | 12Dokumen     | 100,00        | 12 Dokumen  | 48 Dokumen  | 67%        |    |
|   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 305 Laporan | 60 Laporan  | 442 Laporan | 646 Laporan   | 146,15        | 365 Laporan | 950 Laporan | 311%       |    |
|   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 72 Dokumen  | 12 Dokumen  | 12 Dokumen  | 12 Dokumen    | 100,00        | 12 Dokumen  | 30 Dokumen  | 42%        |    |
|   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>Tingkat Pemenuhan pengadaan BMD penunjang urusan OPD</b>                                            | <b>600%</b> | <b>82%</b>  | <b>100%</b> | <b>96,96%</b> | <b>96,55</b>  | <b>100%</b> | <b>197%</b> | <b>28%</b> |    |
|   | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    | 19 unit     | 4 Unit      | 4 Unit      | 4 Unit        | 100,00        | 3 Unit      | 9 Unit      | 100%       |    |
|   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 50 unit     | 10 Unit     | 29 Unit     | 28 Unit       | 96,55         | -           | 50 Unit     | 96%        |    |
|   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                                    | <b>600%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>72,20%</b> | <b>72,20</b>  | <b>100%</b> | <b>289%</b> | <b>48%</b> |    |
|   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 72 Laporan  | 12 Laporan  | 20 Laporan  | 10 Laporan    | 50,00         | 20 Laporan  | 38 Laporan  | 53%        |    |
|   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 72 Laporan  | 12 Laporan  | 48 Laporan  | 36 Dokumen    | 75,00         | 12 Laporan  | 52 Laporan  | 72%        |    |
|   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 72 Laporan  | 12 Laporan  | 4 Laporan   | 4 Laporan     | 100,00        | 2 Laporan   | 28 Laporan  | 39%        |    |
|   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>         | <b>600%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>75,96%</b> | <b>100,00</b> | <b>100%</b> | <b>232%</b> | <b>39%</b> |    |
|   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 131 Unit    | 23 Unit     | 24 Unit     | 24 Unit       | 100,00        | 25 Unit     | 74 Unit     | 56%        |    |



| 1 | 2                                                                                                                               | 3                                                                                                            | 4           | 5           | 6           | 7           | 8=(7/6)       | 9           | 10 =(5+7+9) | 11=(10/4)  | 12 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
|   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                           | 450 Unit    | 64 Unit     | 94 Unit     | 38 unit     | 40,43         | 93 Unit     | 149 Unit    | 33%        |    |
|   | Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                     | 1 Unit      | -           | 1 Unit      | 1 Unit      | 100,00        | 1 Unit      | 1 Unt       | 20%        |    |
|   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>                                                                                      | <b>Persentase pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku</b>     | <b>600%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>95%</b>  | <b>95%</b>    | <b>100%</b> | <b>281%</b> | <b>47%</b> |    |
|   | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>                                                                        | <b>Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah</b>                                       | <b>600%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100,00</b> | <b>100%</b> | <b>274%</b> | <b>46%</b> |    |
|   | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                          | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                     | 12 Dokumen  | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   | 100,00        | 2 Dokumen   | 6 Dokumen   | 50%        |    |
|   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                      | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                                 | 12 Dokumen  | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   | 100,00        | 2 Dokumen   | 6 Dokumen   | 50%        |    |
|   | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | 12 Dokumen  | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   | 100,00        | 2 Dokumen   | 7 Dokumen   | 58%        |    |
|   | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 12 Dokumen  | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   | 100,00        | 2 Dokumen   | 8 Dokumen   | 67%        |    |
|   | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                          | 12 Dokumen  | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   | 100,00        | 2 Dokumen   | 6 Dokumen   | 33%        |    |
|   | <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>                                                                         | <b>Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah</b>                                        | <b>600%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b>   | <b>100%</b> | <b>314%</b> | <b>52%</b> |    |
|   | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                   | 264 Dokumen | 44 Dokumen  | 44 Dokumen  | 44 Dokumen  | 100,00        | 44 Dokumen  | 154 Dokumen | 54%        |    |
|   | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                        | 264 Dokumen | 44 Dokumen  | 44 Dokumen  | 44 Dokumen  | 100,00        | 44 Dokumen  | 187 Dokumen | 66%        |    |
|   | Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                         | 264 Dokumen | 44 Dokumen  | 44 Dokumen  | 44 Dokumen  | 100,00        | 44 Dokumen  | 165 Dokumen | 58%        |    |



| 1 | 2                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                | 4           | 5           | 6           | 7           | 8=(7/6)     | 9           | 10 =(5+7+9) | 11=(10/4)  | 12 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|----|
|   | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 220 Dokumen | 4 Dokumen   | 44 Laporan  | 44 Laporan  | 100,00      | 44 Laporan  | 57 Laporan  | 22%        |    |
|   | Koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank          | 264 Dokumen | 44 Dokumen  | 44 Dokumen  | 44 Dokumen  | 100,00      | 44 Dokumen  | 142 Dokumen | 50%        |    |
|   | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait                         | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                          | 264 Dokumen | -           | 44 Dokumen  | 44 Dokumen  | 100,00      | 44 Dokumen  | 146 Dokumen | 51%        |    |
|   | <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>                                                                  | <b>Terlaksananya koordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah</b>                                                                              | <b>600%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>323%</b> | <b>54%</b> |    |
|   | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                             | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                             | 144 Dokumen | 24 Dokumen  | 24 Dokumen  | 24 Dokumen  | 100,00      | 24 Dokumen  | 54 Dokumen  | 38%        |    |
|   | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                             | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                    | 24 Laporan  | 4 Dokumen   | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 100,00      | 4 Laporan   | 13 Laporan  | 54%        |    |
|   | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                        | 6 Dokumen   | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   | 100,00      | 1 Dokumen   | 4 Dokumen   | 67%        |    |
|   | <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                                                                             | <b>Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                                                                                     | <b>600%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>80%</b>  | <b>80%</b>  | <b>100%</b> | <b>291%</b> | <b>49%</b> |    |
|   | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                       | Jumlah laporan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan                                                                                              | 25 Laporan  | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 100,00      | 4 Laporan   | 14 Laporan  | 56%        |    |
|   | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                      | Terlaksananya pengelolaan anggaran belanja tidak terduga                                                                                                         | 10 Laporan  | 2 Laporan   | 2 Laporan   | -           | 0,00        | 2 Laporan   | 4 Laporan   | 40%        |    |
|   | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                                                                 | Terlaksananya pengelolaan dana bagi hasil                                                                                                                        | 20 Laporan  | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 4 Laporan   | 100,00      | 4 Laporan   | 8 Laporan   | 25%        |    |
|   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>                                                                                             | <b>Persentase hasil sinkronisasi BMD terhadap aset OPD</b>                                                                                                       | <b>600</b>  | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>273%</b> | <b>46%</b> |    |
|   | <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>                                                                                                     | <b>-Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah<br/>- Cakupan Pemenuhan Kartu Inventaris</b>                                                                   | <b>600%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>273%</b> | <b>46%</b> |    |



| 1 | 2                                                                                                       | 3                                                                                                                            | 4           | 5          | 6          | 7          | 8=(7/6) | 9          | 10 =(5+7+9) | 11=(10/4) | 12 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------|------------|-------------|-----------|----|
|   | Penyusunan Standar Harga                                                                                | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                                            | 6 Dokumen   | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  | 100,00  | 1 Dokumen  | 3 Dokumen   | 50%       |    |
|   | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                             | 264 Laporan | 44 Laporan | 44 Laporan | 44 Laporan | 100,00  | 44 Laporan | 132 Laporan | 20%       |    |
|   | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah                                                                 | 5 laporan   | -          | 1 Laporan  | 1 Laporan  | 100,00  | -          | 1 Laporan   | 50%       |    |
|   | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | 10 dokumen  | 10 dokumen | 10 Laporan | 10 Laporan | 100,00  | -          | 20 Laporan  | 20%       |    |
|   | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik                               | 5 Dokumen   | 1 Dokumen  | 1 Laporan  | 1 Laporan  | 100,00  | 1 Laporan  | 1 Laporan   | 40%       |    |
|   | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 36 Dokumen  | 6 Dokumen  | 6 Dokumen  | 6 Dokumen  | 100,00  | 6 Dokumen  | 18 Dokumen  | 20%       |    |
|   | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | 220 Dokumen | 44 Dokumen | 44 Laporan | 44 Laporan | 100,00  | 44 Laporan | 88 Laporan  | 50%       |    |
|   | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun                                                                              | 10 Dokumen  | -          | 2 Laporan  | 2 Laporan  | 100,00  | 2 Laporan  | 2 Laporan   | 40%       |    |



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Perbup Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah dibidang Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan Pengelolaan Aset daerah;
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset daerah;
  - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset BMD Daerah;
  - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
1. Menyusun Rancangan APBD yang merupakan perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Menyusun alokasi belanja daerah dengan setepat-tepatnya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah tahun 2021-2026 dan Peraturan Daerah tentang APBD, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
  3. Ikut serta menyusun rancangan kebijakan alokasi dana transfer kepada desa sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
  4. Membina, mengelola dan menatausahakan barang milik kekayaan daerah (Pengelolaan Aset daerah) dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna Pengelolaan Aset daerah serta pengamanannya.
  5. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.
  6. Ikut serta memajukan pertumbuhan dunia usaha.



Tugas Pokok dan Fungsi tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 03 Oktober 2023.

## **1. Kepala Badan**

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh unit organisasi Badan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan Pengelolaan Aset daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang keuangan dan asset daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **A. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Sekretariat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan Rencana Strategis, rencana kerja, rencana Program dan Anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan asset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi : perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;



- e. Pengelolaan Barang milik Daerah/kekayaan Negara, dan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat, membawahi :

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2. Kelompok Jabatan Fungsional

#### B. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perencanaan Anggaran Daerah meliputi : Anggaran I, Anggaran II, Anggaran III.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
- b. Pengoordinasian penyusunan RKA/DPA SKPD dan/atau RKAP/DPPA SKPD;
- c. Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- d. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD;
- e. Pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
- f. Pengoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;
- g. Pengoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan;
- h. Pengoordinasian penyusunan analisis standar biaya; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Anggaran, membawahi :

- 1. Sub Bidang Anggaran I;
- 2. Sub Bidang Anggaran II;
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional.



### C. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbendaharaan Daerah meliputi : Pengendalian Kas Daerah, Belanja Langsung, dan Belanja Tidak Langsung.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian pengelolaan kas daerah;
- b. Pengoordinasian pemindahbukuan uang kas daerah;
- c. Pengoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah;
- d. Pengoordinasian penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- e. Pengoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar sp2d;
- f. *Pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen spp dan spm, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan spj gaji dan non gaji, serta penerbitan skpp;*
- g. Pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (pfk);
- h. Pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- i. Pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas sp2d dengan instansi terkait;
- j. Pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan *pertanggungjawaban (spj);*
- k. Penyediaan anggaran kas;
- l. Pengoordinasian pelaksanaan penerbitan spd restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan; dan



- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan, membawahi :

- 1. Subbidang Perbendaharaan I;
- 2. Subbidang Perbendaharaan II;
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional;

D. Bidang pengelolaan barang milik daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi : Perencanaan dan Penatausahaan Pengelolaan Aset, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan Pengelolaan Aset serta pemindahtanganan, Penilaian dan Penghapusan Pengelolaan Aset.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- b. Pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c. Pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
- d. Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
- g. Pengoordinasian penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- h. Pengoordinasian hasil penilaian barang milik daerah;
- i. Pelaksanaan penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

- j. Pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- k. Pengoordinasian penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari skpd;
- l. Pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan BMD, membawahi :

- 1. Subbidang Pemindahtangan, Pemusnahan dan Penghapusan;
- 2. Subbidang Penatausahaan dan Pelaporan; dan
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **E. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah**

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah meliputi : Akuntansi Penerimaan, Akuntansi Pengeluaran, dan Pelaporan Keuangan Daerah dan *System Informasi*

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
- b. Pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
- c. Pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. Pengoordinasian kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- f. Pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan skpd, blud dan ppkd;
- g. Pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- h. Penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;



- i. Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- j. Penyusunan system dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- k. Pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- l. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
- m. Pengoordinasian perencanaan, pengelolaan, pemantauan, pemeliharaan sistem informasi dan dokumentasi keuangan daerah; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, membawahi

1. Subbidang Akuntansi Keuangan Daerah;
2. Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam pelaksanaan pelayanan kinerja BKAD dalam pencapaian target kinerja tersebut dipengaruhi faktor internal dan eksternal yang mana dalam penganalisaan kondisi tersebut dilakukan analisa yang diantaranya analisis SWOT, Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal serta perpaduan diantara dua kondisi tersebut, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

#### **Faktor Internal :**

##### **1. Kekuatan/potensi(*Strength*)**

- 1) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 2) Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- 3) Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 4) Personil berasal dari unit yang membidangi urusan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
- 5) Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

##### **2. Kelemahan(*Weaknes*)**

- 1) Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen, serta prasarana penunjang kerja berupa gedung dan ruangan dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hari dan pemberian layanan secara optimal kepada pihak yang berkepentingan.
- 2) Belum terpenuhinya bezetting formasi apabila dibandingkan dengan beban kerja yang ada, sehingga terjadi perangkapan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- 3) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik melalui sistem online dan transparan.
- 4) Belum optimalnya kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas.
- 5) Masih rendahnya minat, motivasi dan pemahaman personil terhadap peraturan perundangan di bidang keuangan dan aset.
- 6) Belum Optimanya transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada e-government dan e-budgeting.

#### **Faktor Eksternal**

##### **1. Kesempatan/Peluang (*Oportunity*)**

- 1) Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 2) Adanya lembaga pemerintahan dan swasta yang mendukung upaya peningkatan kapasitas dan kinerja organisasi serta kompetensi personil.
- 3) Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik
- 4) Adanya kesamaan tekad, pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh SKPD dalam rangka kepatuhan terhadap perundang-undangan di bidang keuangan dan aset daerah.
- 5) Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif.

##### **2. Tantangan/Ancaman(*Treath*)**

- 1) Peraturan perundangan di bidang keuangan dan aset daerah cenderung berubah-ubah dalam waktu cepat.
- 2) Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good corporate governance.
- 3) Masih rendahnya kemampuan aparat pengelola keuangan dan aset daerah SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menurut ketentuan yang berlaku.



Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah semakin ketat dan meningkat intensitasnya.

Dari uraian kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut diatas dapat dijabarkan tabel analisa pelayanan kinerja BKAD pada tabel 2.2 sebagaimana berikut:

**TABEL 2.2**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

| No | SPM/<br>Standar<br>Nasional | IKK                                                                      | Target Renstra SKPD |                                                                                |               |               |               |               | Realisasi Capaian |               |               | Proyeksi      |               |               | Catatan Analisis |             |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------|
|    |                             |                                                                          | Tahun<br>2021       | Tahun<br>2022                                                                  | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2026 | Tahun<br>2021     | Tahun<br>2022 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2021 | Tahun<br>2022 | Tahun<br>2023 |                  |             |
| 1  | 3                           | 4                                                                        | 5                   | 6                                                                              | 7             |               |               | 8             | 9                 |               |               | 11            |               |               | 13               |             |
|    |                             |                                                                          |                     |                                                                                |               |               |               |               |                   |               |               |               |               |               |                  |             |
|    |                             | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN                     |                     | Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor                      | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%              | 100%          | 100%          | 94,81%        | 100%          | 100%          | 94,81%           |             |
|    |                             | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         |                     | Tingkat pemenuhan dokumen Renstra / Renja / Dpa / Evaluasi Renstra, Renja /    | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%              | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%             |             |
|    |                             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                          |                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    | 5 Dokumen     | 5 Dokumen     | 5 Dokumen     | 5 Dokumen     | 5 Dokumen         | 5 Dokumen     | 5 Dokumen     | 5 Dokumen     | 5 Dokumen     | 5 Dokumen     | 5 Dokumen        |             |
|    |                             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi |                     | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan | 8 Laporan     | 8 Laporan     | 8 Laporan     | 8 Laporan     | 8 Laporan         | 8 Laporan     | 4 Laporan     | 8 Laporan     | 8 Laporan     | 4 Laporan     | 8 Laporan        |             |
|    |                             | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                   |                     | Tingkat pemenuhan dokumen Laporan keuangan tahunan OPD                         | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%              | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%             |             |
|    |                             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                        |                     | Jumlah Orang yang Menerima =Gaji dan Tunjangan ASN                             | 41 Orang      | 41 Orang      | 41 Orang      | 41 Orang      | 41 Orang          | 41 Orang      | 41 Orang      | 41 Orang      | 41 Orang      | 41 Orang      | 41 Orang         |             |
|    |                             | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                            |                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN             | 24 Orang      | 12 Dokumen    | 12 Dokumen    | 12 Dokumen    | 12 Dokumen        | 12 Dokumen    | 24 Orang      | 12 Dokumen    | 12 Dokumen    | 24 Orang      | 12 Dokumen       |             |
|    |                             | Pelaksanaan Pentausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD          |                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD            | 12 Bulan      | 12 Dokumen    | 12 Dokumen    | 12 Dokumen    | 12 Dokumen        | 12 Dokumen    | 12 Bulan      | -             | -             | 12 Bulan      | -                |             |
|    |                             | Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                   |                     | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut                   | -             | 2 Dokumen     | 2 Dokumen     | 2 Dokumen     | 2 Dokumen         | 2 Dokumen     | -             | -             | 2 Dokumen     | -             | -                | 2 Dokumen   |
|    |                             | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                |                     | Meningkatnya Disiplin Aparatur                                                 | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%              | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%             |             |
|    |                             | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                   |                     | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                         | 80 Orang      | 105 Paket     | 105 Paket     | 110 Paket     | 110 Paket         | 115 Paket     | 80 Orang      | 80 Paket      | 90 Paket      | 80 Orang      | 80 Paket         | 90 Paket    |
|    |                             | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi            |                     | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan      | -             | 5 Orang       | 5 Orang       | 5 Orang       | 5 Orang           | 5 Orang       | -             | -             | -             | -             | -                | -           |
|    |                             | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       |                     | Cakupan layanan adm umum OPD meliputi 7 sub kegiatan (bernilai 100%)           | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%              | 100%          | 100%          | 100%          | 118,47%       | 100%          | 100%             | 118,47%     |
|    |                             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor         |                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang        | 12 Bulan      | 1 Paket       | 1 Paket       | 1 Paket       | 1 Paket           | 1 Paket       | 12 Bulan      | 1 Paket       | 2 Paket       | 12 Bulan      | 1 Paket          | 2 Paket     |
|    |                             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                             |                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                 | 12 Bulan      | 4 Paket       | 4 Paket       | 4 Paket       | 4 Paket           | 4 Paket       | 12 Bulan      | 4 Paket       | 4 Paket       | 12 Bulan      | 4 Paket          | 4 Paket     |
|    |                             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                         |                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang                                        | 12 Bulan      | 3 Paket       | 3 Paket       | 3 Paket       | 3 Paket           | 3 Paket       | 12 Bulan      | 3 Paket       | 2 Paket       | 12 Bulan      | 3 Paket          | 2 Paket     |
|    |                             | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                |                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | 12 Bulan      | 1 Paket       | 1 Paket       | 1 Paket       | 1 Paket           | 1 Paket       | 12 Bulan      | 1 Paket       | 1 Paket       | 12 Bulan      | 1 Paket          | 1 Paket     |
|    |                             | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                 |                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang              | 29 Media      | 12 Dokumen    | 12 Dokumen    | 12 Dokumen    | 12 Dokumen        | 12 Dokumen    | 29 Media      | 12 Dokumen    | 12Dokumen     | 29 Media      | 12 Dokumen       | 12Dokumen   |
|    |                             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     |                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD            | 12 Bulan      | 60 Laporan    | 60 Laporan    | 60 Laporan    | 60 Laporan        | 65 Laporan    | 12 Bulan      | 60 Laporan    | 646 Laporan   | 12 Bulan      | 60 Laporan       | 646 Laporan |
|    |                             | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                    |                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                           | 12 Bulan      | 12 Dokumen    | 12 Dokumen    | 12 Dokumen    | 12 Dokumen        | 12 Dokumen    | 12 Bulan      | 12 Dokumen    | 12 Dokumen    | 12 Bulan      | 12 Dokumen       | 12 Dokumen  |



| No |                                                                                                                     | SPM/<br>Standar<br>Nasional | IKK                                                                                                    | Target Renstra SKPD |                    |                    |                    |                    |                    | Realisasi Capaian |               |               | Proyeksi      |               |               | Catatan Analisis |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|    |                                                                                                                     |                             |                                                                                                        | Tahun<br>2021       | Tahun<br>2022      | Tahun<br>2023      | Tahun<br>2024      | Tahun<br>2025      | Tahun<br>2026      | Tahun<br>2021     | Tahun<br>2022 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2021 | Tahun<br>2022 | Tahun<br>2023 |                  |
| 1  |                                                                                                                     | 3                           | 4                                                                                                      | 5                   | 6                  | 7                  |                    |                    | 8                  | 9                 |               |               | 11            |               |               | 13               |
|    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    |                             | Tingkat Pemenuhan pengadaan BMD penunjang urusan OPD                                                   |                     | 100%               | 100%               | 100%               | 100%               | 100%               |                   | 82%           | 96,96%        |               | 82%           | 96,96%        |                  |
|    | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   |                             | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang                               | -                   | 7 Unit             | 1 Unit             | 1 unit             | -                  | -                  | -                 | 4 Unit        | 4 Unit        | -             | 4 Unit        | 4 Unit        |                  |
|    | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                             | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 1 Kegiatan          | 10 unit            | 10 unit            | 10 unit            | 10 unit            | 10 unit            | 1 Kegiatan        | 10 Unit       | 28 Unit       | 1 Kegiatan    | 10 Unit       | 28 Unit       |                  |
|    | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                       |                             | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                        | -                   | -                  | 1 Bangunan         | -                  | -                  | -                  | -                 | -             | -             | -             | -             | -             |                  |
|    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  |                             | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                   | -                   | -                  | 20 Unit            | -                  | -                  | -                  | -                 | -             | -             | -             | -             | -             |                  |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                             | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                           | 100%                | 100%               | 100%               | 100%               | 100%               | 100%               | 100%              | 100%          | 72,20%        | 100%          | 100%          | 72,20%        |                  |
|    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Bulan            | 12 Laporan         | 12 Laporan         | 12 Laporan         | 12 Laporan         | 12 Laporan         | 12 Bulan          | 12 Laporan    | 10 Laporan    | 12 Bulan      | 12 Laporan    | 10 Laporan    |                  |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                 |                     | 12 Laporan         | 12 Laporan         | 12 Laporan         | 12 Laporan         | 12 Laporan         |                   | 12 Laporan    | 36 Dokumen    |               | 12 Laporan    | 36 Dokumen    |                  |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Bulan            | 12 Laporan         | 12 Laporan         | 12 Laporan         | 12 Laporan         | 12 Laporan         | 12 Bulan          | 12 Laporan    | 4 Laporan     | 12 Bulan      | 12 Laporan    | 4 Laporan     |                  |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                             | Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan                                    | 100%                | 100%               | 100%               | 100%               | 100%               | 100%               | 100%              | 100%          | 75,96%        | 100%          | 100%          | 75,96%        |                  |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                             | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 Bulan            | 23 Kendaraan Dinas | 23 Kendaraan Dinas | 25 Kendaraan dinas | 30 Kendaraan dinas | 30 Kendaraan dinas | 12 Bulan          | 23 Unit       | 24 Unit       | 12 Bulan      | 23 Unit       | 24 Unit       |                  |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                             | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 12 Bulan            | 90 Unit            | 90 Unit            | 90 Unit            | 90 Unit            | 90 Unit            | 12 Bulan          | 64 Unit       | 38 unit       | 12 Bulan      | 64 Unit       | 38 unit       |                  |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                         |                             | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | -                   | 1 Unit             | 1 Unit             | 1 Unit             | 1 Unit             | 1 Unit             | -                 | -             | 1 Unit        | -             | -             | 1 Unit        |                  |
|    | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                 |                             | Persentase pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan tepat waktu sesuai                                 | 100%                | 100%               | 100%               | 100%               | 100%               | 100%               | 100%              | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          |                  |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                   |                             | Tertaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah                                        | 100%                | 100%               | 100%               | 100%               | 100%               | 100%               | 100%              | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          |                  |
|    | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                              |                             | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                               | 2 Dokumen           | 2 Dokumen          | 2 Dokumen          | 2 Dokumen          | 2 Dokumen          | 2 Dokumen          | 2 Dokumen         | 2 Dokumen     | 2 Dokumen     | 2 Dokumen     | 2 Dokumen     | 2 Dokumen     |                  |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                          |                             | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                           | 2 Dokumen           | 2 Dokumen          | 2 Dokumen          | 2 Dokumen          | 2 Dokumen          | 2 Dokumen          | 2 Dokumen         | 2 Dokumen     | 2 Dokumen     | 2 Dokumen     | 2 Dokumen     | 2 Dokumen     |                  |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala                                        |                             | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang                               | 2 Dokumen           | 2 Dokumen          | 2 Dokumen          | 2 Dokumen          | 2 Dokumen          | 2 Dokumen          | 2 Dokumen         | 2 Dokumen     | 2 Dokumen     | 2 Dokumen     | 2 Dokumen     | 2 Dokumen     |                  |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan                                               |                             | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala                                    | 2 Dokumen           | 2 Dokumen          | 2 Dokumen          | 2 Dokumen          | 2 Dokumen          | 2 Dokumen          | 2 Dokumen         | 2 Dokumen     | 2 Dokumen     | 2 Dokumen     | 2 Dokumen     | 2 Dokumen     |                  |
|    | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                      |                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan                                                            | 44 SKPD             | 2 Dokumen          | 2 Dokumen          | 2 Dokumen          | 2 Dokumen          | 2 Dokumen          | 44 SKPD           | 2 Dokumen     | 2 Dokumen     | 44 SKPD       | 2 Dokumen     | 2 Dokumen     |                  |



| No |                                                                                                                                                                                        | SPM/<br>Standar<br>Nasional | IKK                                                                                                                                                              | Target Renstra SKPD |               |               |               |               |               | Realisasi Capaian |               |               | Proyeksi      |               |               | Catatan Analisis |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|    |                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                  | Tahun<br>2021       | Tahun<br>2022 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2026 | Tahun<br>2021     | Tahun<br>2022 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2021 | Tahun<br>2022 | Tahun<br>2023 |                  |
| 1  |                                                                                                                                                                                        | 3                           | 4                                                                                                                                                                | 5                   | 6             | 7             |               |               | 8             | 9                 |               |               | 11            |               |               | 13               |
|    | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                                                       |                             | Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah                                                                                                   | 100%                | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%              | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          |                  |
|    | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                  |                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                       | 578 Buku            | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    | 578 Buku          | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    | 578 Buku      | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    |                  |
|    | Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                                                                                                                           |                             | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun                                                                                           | -                   | -             | 44 SKPD       | -             | -             | -             | -                 | -             | -             | -             | -             | -             |                  |
|    | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                |                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                            | 44 SKPD             | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    | 44 SKPD           | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    | 44 SKPD       | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    |                  |
|    | Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                                                                        |                             | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                             | 44 SKPD             | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    | 44 SKPD           | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    | 44 SKPD       | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    |                  |
|    | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                             |                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 4 Dokumen           | 4 Dokumen     | -             | 4 Dokumen     | 4 Dokumen     | 4 Dokumen     | 4 Dokumen         | 4 Dokumen     | -             | 4 Dokumen     | 4 Dokumen     | -             |                  |
|    | Koordinasi dan Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran perhitungan pihak ketiga |                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank          | -                   | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    | -                 | -             | 44 Dokumen    | -             | -             | 44 Dokumen    |                  |
|    | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan                                                                                                         |                             | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran                                                                                   | -                   | 44 Laporan    | 44 Laporan    | 44 Laporan    | 44 Laporan    | 44 Laporan    | -                 | -             | -             | -             | -             | -             |                  |
|    | Koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan                                                                                                            |                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah                                                                                             | 44 SKPD             | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    | 44 SKPD           | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    | 44 SKPD       | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    |                  |
|    | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan                                                                                                                  |                             | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta                                                                                      | 44 SKPD             | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    | -             | 44 SKPD           | -             | -             | 44 SKPD       | -             | -             |                  |
|    | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan                                                                                                                 |                             | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan                                                                                               | -                   | 4 Dokumen     | 4 Dokumen     | 4 Dokumen     | 4 Dokumen     | 4 Dokumen     | -                 | -             | -             | -             | -             | -             |                  |
|    | Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                             |                             | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah                                                                                          | -                   | 44 Orang      | 44 Orang      | 44 Orang      | 44 Orang      | 44 Orang      | -                 | -             | -             | -             | -             | -             |                  |
|    | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                     |                             | Terlaksananya koordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan                                                                                            | 100%                | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%              | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          |                  |
|    | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,                                                                                                 |                             | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,                                                                                       | 24 Dokumen          | 24 Dokumen    | 24 Dokumen    | 24 Dokumen    | 24 Dokumen    | 24 Dokumen    | 24 Dokumen        | 24 Dokumen    | 24 Dokumen    | 24 Dokumen    | 24 Dokumen    | 24 Dokumen    |                  |
|    | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah                                                                                                                |                             | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah                                                                                               | 4 Dokumen           | 4 Laporan     | 4 Laporan     | 4 Laporan     | 4 Laporan     | 4 Laporan     | 4 Dokumen         | 4 Laporan     | 4 Laporan     | 4 Dokumen     | 4 Laporan     | 4 Laporan     |                  |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang                                                                                                                           |                             | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan                                                                                         | -                   | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | -                 | -             | -             | -             | -             | -             |                  |
|    | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                        |                             | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                        | 1 Dokumen           | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen         | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     |                  |
|    | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                      |                             | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                    | -                   | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | -                 | -             | -             | -             | -             | -             |                  |
|    | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                        |                             | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina                                                                                                                           | -                   | 44 Orang      | 44 Orang      | 44 Orang      | 44 Orang      | 44 Orang      | -                 | -             | -             | -             | -             | -             |                  |



| No |                                                                                                               | SPM/<br>Standar<br>Nasional | IKK                                                                                                                                   | Target Renstra SKPD |               |               |               |               |               | Realisasi Capaian |               |               | Proyeksi      |               |               | Catatan Analisis |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|    |                                                                                                               |                             |                                                                                                                                       | Tahun<br>2021       | Tahun<br>2022 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2025 | Tahun<br>2026 | Tahun<br>2021     | Tahun<br>2022 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2021 | Tahun<br>2022 | Tahun<br>2023 |                  |
| 1  |                                                                                                               | 3                           | 4                                                                                                                                     | 5                   | 6             | 7             |               |               | 8             | 9                 |               |               | 11            |               |               | 13               |
|    | Penunjang Urusan Kewenangan<br>Pengelolaan Keuangan Daerah                                                    |                             | Terlaksananya Penunjang Urusan<br>Kewenangan Pengelolaan Keuangan<br>Daerah                                                           | 100%                | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%              | 100%          | 80%           | 100%          | 100%          | 80%           |                  |
|    | Analisis Perencanaan dan Penyaluran<br>Bantuan Keuangan                                                       |                             | Jumlah laporan analisis perencanaan dan<br>penyaluran bantuan keuangan                                                                | 114 Desa            | 4 Laporan     | 4 Laporan     | 4 Laporan     | 4 Laporan     | 4 Laporan     | 114 Desa          | 4 Laporan     | 4 Laporan     | 114 Desa      | 4 Laporan     | 4 Laporan     |                  |
|    | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                         |                             | Terlaksananya pengelolaan anggaran<br>belanja tidak terduga                                                                           | 1 Tahun             | 2 Laporan     | 2 Laporan     | 2 Laporan     | 2 Laporan     | 2 Laporan     | 1 Tahun           | 2 Laporan     | -             | 1 Tahun       | 2 Laporan     | -             |                  |
|    | Pengelolaan Dana Bagi Hasil<br>Kabupaten/Kota                                                                 |                             | Terlaksananya pengelolaan dana bagi hasil                                                                                             | 114 Desa            | 4 Laporan     | 4 Laporan     | 4 Laporan     | 4 Laporan     | 4 Laporan     | 114 Desa          | 4 Laporan     | 4 Laporan     | 114 Desa      | 4 Laporan     | 4 Laporan     |                  |
|    | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG<br>MILIK DAERAH                                                                    |                             | Persentase hasil sinkronisasi BMD<br>terhadap aset OPD                                                                                | 100%                | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%              | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          |                  |
|    | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                               |                             | -Terlaksananya pengelolaan barang milik<br>daerah<br>- Cakupan Pemenuhan Kartu Inventaris                                             | 100%                | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%              | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          | 100%          |                  |
|    | Penyusunan Standar Harga                                                                                      |                             | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                                                     | 1 Dokumen           | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen         | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     |                  |
|    | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan<br>Barang Milik Daerah                                                       |                             | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah                                                                                       | -                   | 2 Dokumen     | 2 Dokumen     | 2 Dokumen     | 2 Dokumen     | 2 Dokumen     | -                 | -             | -             | -             | -             | -             |                  |
|    | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah                                                       |                             | Tersedianya kebijakan pengelolaan barang<br>milik daerah                                                                              | 10 Dokumen          | -             | -             | -             | -             | -             | 10 Dokumen        | -             | -             | 10 Dokumen    | -             | -             |                  |
|    | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                             |                             | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang<br>Milik Daerah                                                                                   |                     | 44 Laporan    | 44 Laporan    | 44 Laporan    | 44 Laporan    | 44 Laporan    | 44 Laporan        | 44 Laporan    | 44 Laporan    |               | 44 Laporan    | 44 Laporan    |                  |
|    | Inventarisasi Barang (Milik Daerah)                                                                           |                             | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)<br>Barang Milik Daerah                                                                       | -                   | 1 Laporan     | 1 Laporan     | 1 Laporan     | 1 Laporan     | 1 Laporan     | -                 | -             | 1 Laporan     | -             | -             | 1 Laporan     |                  |
|    | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                                |                             | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang<br>Milik Daerah                                                                                | -                   | 10 dokumen    | 10 dokumen    | 10 dokumen    | 10 dokumen    | 10 dokumen    | -                 | 10 dokumen    | 10 dokumen    | -             | 10 dokumen    | 10 dokumen    |                  |
|    | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                                 |                             | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang<br>Milik Daerah dan Hasil Koordinasi<br>Penilaian Barang Milik Daerah                           | -                   | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | -                 | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | -             | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     |                  |
|    | Pengawasan dan Pengendalian<br>Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                |                             | Terlaksananya pengawasan dan<br>pengendalian barang milik daerah                                                                      | 6 Dokumen           | -             | -             | -             | -             | -             | 6 Dokumen         | -             | -             | 6 Dokumen     | -             | -             |                  |
|    | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan<br>Penghapusan Barang Milik Daerah |                             | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi<br>Penggunaan, Pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan<br>Penghapusan Barang Milik Daerah | 6 Dokumen           | 6 Dokumen     | 6 Dokumen     | 6 Dokumen     | 6 Dokumen     | 6 Dokumen     | 6 Dokumen         | 6 Dokumen     | 6 Dokumen     | 6 Dokumen     | 6 Dokumen     | 6 Dokumen     |                  |
|    | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan<br>Laporan Barang Milik Daerah                                           |                             | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam<br>rangka Penyusunan Laporan Barang Milik<br>Daerah                                           | 12 Bulan            | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    | 12 Bulan          | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    | 12 Bulan      | 44 Dokumen    | 44 Dokumen    |                  |
|    | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                        |                             | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah<br>yang Disusun                                                                                    | -                   | 2 Laporan     | 2 Laporan     | 2 Laporan     | 2 Laporan     | 2 Laporan     | -                 | -             | 2 Laporan     | -             | -             | 2 Laporan     |                  |

**2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD**

Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian yang signifikan bagi SKPD dimana dengan beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

Telaahan terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang kemudian dilakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal menjadi dasar dalam merumuskan kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis, yaitu keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis yang harus diperhatikan berdasarkan tupoksi BKAD adalah :

- a. Aplikasi SIPD yang belum maksimal dan keterbatasan kemampuan sumber keuangan dalam memenuhi kebutuhan pagu OPD
- b. Sering terjadi perubahan regulasi kebijakan dan perundang-undangan dari pusat
- c. Terdapat aset milik Pemerintah Daerah berupa tanah jalan (fasilitas umum) yang belum memiliki legalitas hukum (Sertifikat)
- d. Optimalisasi pemanfaatan aset dalam meningkatkan pendapatan daerah

**2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Hasil analisa kebutuhan dalam review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 dapat disajikan dalam Tabel 2.4 sebagai berikut :



**Tabel 2.4**  
**Rancangan Renja BKAD terhadap RKPD tahun 2025**  
**Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

| NO | RKPD                                                                                  |        |                                                                       |                |                | Hasil Analisa Kebutuhan                                                               |        |                                                                                                                                                                        |                |                | Catatan Penting |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|    | Program / Kegiatan                                                                    | Lokasi | Indikator Kinerja                                                     | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Program / Kegiatan                                                                    | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      | Target Capaian | Pagu Indikatif |                 |
| 1  | 7                                                                                     | 8      | 9                                                                     | 10             | 11             | 2                                                                                     | 3      | 4                                                                                                                                                                      | 5              | 6              | 12              |
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                          | BKAD   |                                                                       |                | 14.214.050.695 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                          | BKAD   |                                                                                                                                                                        |                | 13.529.529.695 |                 |
|    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | BKAD   | Renstra / Renja / Dpa / Evaluasi Renstra, Renja / Lakip yang disusun  |                | 132.199.750    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | BKAD   | Tingkat pemenuhan dokumen Renstra / Renja / Dpa / Evaluasi Renstra, Renja / Lakip yang disusun dan dilaporkan                                                          |                | 167.199.750    |                 |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | BKAD   | Ranwal/ rancangan/ ranhir / renstra / renstra yang disusun            | 5 Dokumen      | 60.000.000     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | BKAD   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 5 Dokumen      | 95.000.000     |                 |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | BKAD   | LAKIP / LPPK/ LPPD / Lap. Keu / dst.. Yang disusun                    | 4 Dokumen      | 72.199.750     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8 Laporan      | 72.199.750     |                 |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | BKAD   | Laporan keuangan tahunan OPD                                          |                | 8.407.654.445  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | BKAD   | Tingkat pemenuhan dokumen Laporan keuangan tahunan OPD                                                                                                                 |                | 8.082.091.445  |                 |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | BKAD   | Jumlah ASN yang dibayarkan gaji/ tunjangan                            | 41 Orang       | 7.430.554.445  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | BKAD   | Jumlah Orang yang Menerima =Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                     | 41 Orang       | 7.119.255.445  |                 |
|    | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | BKAD   | Jumlah ASN dibayarkan honorarium                                      | 24 Orang       | 855.000.000    | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | BKAD   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 12 Dokumen     | 876.736.000    |                 |
|    | Pelaksanaan Pentausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                       | BKAD   | Jumlah laporan hasil pengujian / verifikasi keuangan OPD yang disusun | 12 Bulan       | 36.000.000     | Pelaksanaan Pentausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                       | BKAD   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 12 Dokumen     | -              |                 |
|    | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | BKAD   | Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang tersiapkan                    | 2 Dokumen      | 86.100.000     | \\                                                                                    | BKAD   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                               | 2 Dokumen      | 86.100.000     |                 |
|    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | BKAD   | Meningkatnya Disiplin Aparatur                                        |                | 200.000.000    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | BKAD   | Meningkatnya Disiplin Aparatur                                                                                                                                         |                | 150.000.000    |                 |
|    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | BKAD   | Jumlah pakaian dinas yang di beli                                     | 80 Orang       | 150.000.000    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | BKAD   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 110 Paket      | 150.000.000    |                 |
|    | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | BKAD   | Jumlah pegawai yang diberikan pendidikan / pelatihan                  | 5 Orang        | 50.000.000     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | BKAD   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 5 Orang        | -              |                 |
|    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | BKAD   | Cakupan layanan adm umum OPD meliputi 7 sub kegiatan (bernilai 100%)  |                | 1.861.196.500  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | BKAD   | Cakupan layanan adm umum OPD meliputi 7 sub kegiatan (bernilai 100%)                                                                                                   |                | 1.631.196.500  |                 |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | BKAD   | Jumlah bulan (waktu) penyediaan penerangan kantor                     | 12 Bulan       | 70.996.500     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | BKAD   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 1 Paket        | 70.996.500     |                 |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | BKAD   | jumlah alat / perlengkapan kantor yang dibeli / disediakan            | 12 Bulan       | 255.000.000    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | BKAD   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 4 Paket        | 255.000.000    |                 |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | BKAD   | Tersedianya Makanan dan Minuman                                       | 12 Bulan       | 140.000.000    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | BKAD   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 3 Paket        | 100.000.000    |                 |



| NO | RKPD                                                                                                                |        |                                                                                                             |                                  |                | Hasil Analisa Kebutuhan                                                                                             |        |                                                                                                        |                    |                | Catatan Penting |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|
|    | Program / Kegiatan                                                                                                  | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                                           | Target Capaian                   | Kebutuhan Dana | Program / Kegiatan                                                                                                  | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                                      | Target Capaian     | Pagu Indikatif |                 |
| 1  | 7                                                                                                                   | 8      | 9                                                                                                           | 10                               | 11             | 2                                                                                                                   | 3      | 4                                                                                                      | 5                  | 6              | 12              |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | BKAD   | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                                                                    | 12 Bulan                         | 58.000.000     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | BKAD   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 1 Paket            | 58.000.000     |                 |
|    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | BKAD   | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan-undangan                                                             | 29 Media                         | 40.000.000     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | BKAD   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 12 Dokumen         | 50.000.000     |                 |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | BKAD   | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi sesuai kebutuhan secara efisien                                     | 12 Bulan                         | 1.200.000.000  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | BKAD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 60 Laporan         | 1.000.000.000  |                 |
|    | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | BKAD   | Jumlah kelompok arsip dinamis yang dikelola                                                                 | 12 Bulan                         | 97.200.000     | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | BKAD   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 12 Dokumen         | 97.200.000     |                 |
|    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | BKAD   | Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan OPD                                                                   |                                  | 500.000.000    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | BKAD   | Tingkat Pemenuhan pengadaan BMD penunjang urusan OPD                                                   |                    | 1.569.042.000  |                 |
|    | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | BKAD   | Jumlah kendaraan roda empat / kendaraan roda dua yang di beli                                               | 7 Kendaraan Dinas                | -              | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | BKAD   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    | 3 Unit             | 1.369.042.000  |                 |
|    | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | BKAD   | Jumlah alat / mesin atau (nama alat / mesin) yang di beli                                                   | 1 Kegiatan                       | 500.000.000    | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | BKAD   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 10 Unit            | 200.000.000    |                 |
|    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | BKAD   | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                                |                                  | 1.593.000.000  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | BKAD   | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                           |                    | 1.210.000.000  |                 |
|    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | BKAD   | Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dikelola                                                           | 12 Bulan                         | 5.000.000      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | BKAD   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan         | 40.000.000     |                 |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | BKAD   | Jumlah hitungan beban telepon / air / listrik yang terpakai, atau jumlah hitungan rupiah yang dibayarkan    | 12 Bulan                         | 760.000.000    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | BKAD   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan         | 760.000.000    |                 |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | BKAD   | Jumlah Jasa Untuk Pelayanan Kantor                                                                          | 12 Bulan                         | 828.000.000    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | BKAD   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan         | 410.000.000    |                 |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | BKAD   | Jumlah total BMD yang dipelihara                                                                            |                                  | 1.520.000.000  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | BKAD   | Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                |                    | 720.000.000    |                 |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | BKAD   | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara/perbaikan / dibayarkan pajak | - 5 Unit mobil<br>-20 Unit Motor | 270.000.000    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | BKAD   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 25 Kendaraan dinas | 340.000.000    |                 |
|    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | BKAD   | Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara / perbaikan                                                  | 14 Unit                          | 350.000.000    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | BKAD   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 90 Unit            | 350.000.000    |                 |



| NO | RKPD                                                                                                                            |        |                                                                                                                         |                |                 | Hasil Analisa Kebutuhan                                                                                                         |        |                                                                                                              |                |                 | Catatan Penting |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|    | Program / Kegiatan                                                                                                              | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                                                       | Target Capaian | Kebutuhan Dana  | Program / Kegiatan                                                                                                              | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                                            | Target Capaian | Pagu Indikatif  |                 |
| 1  | 7                                                                                                                               | 8      | 9                                                                                                                       | 10             | 11              | 2                                                                                                                               | 3      | 4                                                                                                            | 5              | 6               | 12              |
|    | Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                     | BKAD   | Jumlah gedung kantor / bangunan lainnya yg dipelihara /rehab                                                            | 1 Unit         | 900.000.000     | Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                     | BKAD   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                     | 1 Unit         | 30.000.000      |                 |
|    | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                             | BKAD   | Persentase pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku                       |                | 237.307.823.049 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                             | BKAD   | Persentase pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku            |                | 237.344.939.814 |                 |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                               | BKAD   | Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah                                                         |                | 1.875.971.877   | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                               | BKAD   | Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah                                              |                | 1.956.239.000   |                 |
|    | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                          | BKAD   | Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS yang tepat waktu                                                                       | 2 Dokumen      | 262.282.266     | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                          | BKAD   | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                     | 2 Dokumen      | 250.000.000     |                 |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                      | BKAD   | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu                                                                    | 2 Dokumen      | 261.738.956     | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                      | BKAD   | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                                 | 2 Dokumen      | 276.000.000     |                 |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | BKAD   | Jumlah Raperda/Perda tentang APBD yang disusun tepat waktu                                                              | 2 Dokumen      | 902.595.578     | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | BKAD   | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | 2 Dokumen      | 950.000.000     |                 |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | BKAD   | Jumlah Raperda/Perda tentang perubahan APBD yang disusun tepat waktu                                                    | 2 Dokumen      | 274.393.800     | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | BKAD   | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 Dokumen      | 280.239.000     |                 |
|    | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                  | BKAD   | Terlaksananya Koordinas penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (RKA-SKPD)                      | 1 Kegiatan     | 174.961.277     | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                  | BKAD   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                          | 2 Dokumen      | 200.000.000     |                 |
|    | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                | BKAD   | Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah                                                         |                | 816.016.832     | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                | BKAD   | Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah                                              |                | 835.786.743     |                 |
|    | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                           | BKAD   | Jumlah terbukukannya jenis transaksi pengeluaran, penerimaan, belanja daerah dan Mou antara pihak SKPD dan bank terkait | 578 Buku       | 252.691.230,00  | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                           | BKAD   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                   | 44 Dokumen     | 252.691.230,00  |                 |



| NO | RKPD                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                             |                |                | Hasil Analisa Kebutuhan                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                              |                |                | Catatan Penting |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|    | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                   | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                                                           | Target Capaian | Kebutuhan Dana | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                   | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian | Pagu Indikatif |                 |
| 1  | 7                                                                                                                                                                                    | 8      | 9                                                                                                                           | 10             | 11             | 2                                                                                                                                                                                    | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                            | 5              | 6              | 12              |
|    | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                              | BKAD   | Jumlah terbitnya spd pertriwulan dan spd perubahan pada SKPD                                                                | 44 SKPD        | 116.027.134,00 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                              | BKAD   | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                                                        | 44 Dokumen     | 240.000.000,00 |                 |
|    | Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                                                                      | BKAD   | terlaksananya pembiayaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku                                     | 44 SKPD        | 32.736.000,00  | Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                                                                      | BKAD   | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                                                                                         | 44 Dokumen     | 32.736.000,00  |                 |
|    | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                           | BKAD   | Jumlah terbitnya laporan DAK fisik, DAK Non fisik, dana desa dan DID                                                        | 4 Dokumen      | 113.392.125,00 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                           | BKAD   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                             | 4 Dokumen      | 113.392.125,00 |                 |
|    | Koordinasi dan Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga | BKAD   | tertibnya laporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah pada SKPD                                                           | 44 SKPD        | 71.289.422,00  | Koordinasi dan Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga | BKAD   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                                      | 44 Dokumen     | -              |                 |
|    | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas              | BKAD   | Jumlah terkoordinasinya penagihan piutang dan utang pada SKPD                                                               | 44 SKPD        | 30.434.963,00  | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas              | BKAD   | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan | 44 Laporan     | -              |                 |
|    | Koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank                                                    | BKAD   | terlaksananya pembayaran non tunai terhadap penerimaan dan pembiayaan daerah pada SKPD                                      | 44 SKPD        | 76.967.388,00  | Koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank                                                    | BKAD   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan                                                                                 | 44 Dokumen     | 76.967.388,00  |                 |
|    | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                   | BKAD   | terlaksananya rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 44 SKPD        | 57.111.969,80  | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                   | BKAD   | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                      | 44 Dokumen     | 70.000.000,00  |                 |
|    | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan                        | BKAD   | tersusunnya regulasi tentang administrasi pengelolaan keuangan daerah                                                       | 4 Dokumen      | 32.097.400,00  | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan                        | BKAD   | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                                                    | 4 Dokumen      | -              |                 |
|    | Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                           | BKAD   | terlaksananya pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                           | 44 SKPD        | 33.269.200,00  | Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                           | BKAD   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                       | 44 Orang       | 50.000.000,00  |                 |
|    | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                   | BKAD   | Terlaksananya koordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah                                                |                | 1.272.130.405  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                   | BKAD   | Terlaksananya koordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah                                                                                                                                                 |                | 1.272.130.405  |                 |
|    | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                                       | BKAD   | Jumlah dokumen rekonsiliasi pendapatan dan belanja seluruh SKPD                                                             | 24 Laporan     | 215.105.880    | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                                       | BKAD   | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                                         | 24 Dokumen     | 215.105.880    |                 |
|    | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                       | BKAD   | Jumlah Dokumen laporan Keuangan semester                                                                                    | 4 Dokumen      | 248.622.570    | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                       | BKAD   | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                                                                                | 4 Laporan      | 248.622.570    |                 |



| NO | RKPD                                                                              |        |                                                                                                          |                |                 | Hasil Analisa Kebutuhan                                                           |        |                                                                                                       |                |                 | Catatan Penting |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|    | Program / Kegiatan                                                                | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                                        | Target Capaian | Kebutuhan Dana  | Program / Kegiatan                                                                | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                                     | Target Capaian | Pagu Indikatif  |                 |
| 1  | 7                                                                                 | 8      | 9                                                                                                        | 10             | 11              | 2                                                                                 | 3      | 4                                                                                                     | 5              | 6               | 12              |
|    | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                   | BKAD   | tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah unaidited dan audited tepat waktu                         | 1 Dokumen      | 401.201.955     | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                   | BKAD   | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                             | 1 Dokumen      | 401.201.955     |                 |
|    | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | BKAD   | Tersusunnya sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang     | 1 Dokumen      | 130.000.000     | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | BKAD   | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                         | 1 Dokumen      | 130.000.000     |                 |
|    | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota   | BKAD   | Jumlah terlatihnya SDM SKPD dalam menyusun laporan keuangan                                              | 1 Kegiatan     | 277.200.000     | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota   | BKAD   | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina                                                                | 88 Orang       | 277.200.000     |                 |
|    | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                           | BKAD   | Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                    |                | 233.343.703.935 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                           | BKAD   | Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                 |                | 233.280.783.666 |                 |
|    | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                              | BKAD   | Jumlah laporan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan                                      | 114 Desa       | 222.630.746.731 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                              | BKAD   | Jumlah laporan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan                                   | 4 Laporan      | 222.567.826.462 |                 |
|    | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                             | BKAD   | Terlaksananya pengelolaan anggaran belanja tidak terduga                                                 | 1 Tahun        | 6.264.651.696   | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                             | BKAD   | Terlaksananya pengelolaan anggaran belanja tidak terduga                                              | 2 Laporan      | 6.264.651.696   |                 |
|    | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota                                        | BKAD   | Terlaksananya pengelolaan dana bagi hasil                                                                | 114 Desa       | 4.448.305.508   | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota                                        | BKAD   | Terlaksananya pengelolaan dana bagi hasil                                                             | 4 Laporan      | 4.448.305.508   |                 |
|    | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                           | BKAD   | Terciptanya tata kelola Barang Milik Daerah yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku |                | 2.422.600.000   | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                           | BKAD   | Persentase hasil sinkronisasi BMD terhadap aset OPD                                                   |                | 2.677.667.424   |                 |
|    | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                   | BKAD   | Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah                                                            |                | 2.422.600.000   | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                   | BKAD   | -Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah<br>- Cakupan Pemenuhan Kartu Inventaris                |                | 2.677.667.424   |                 |
|    | Penyusunan Standar Harga                                                          | BKAD   | Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga Barang                                                               | 1 Dokumen      | 214.900.000     | Penyusunan Standar Harga                                                          | BKAD   | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                     | 1 Dokumen      | 214.900.000     |                 |
|    | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                              | BKAD   | Jumlah Dokumen Rencana kebutuhan barang milik daerah                                                     | 2 Dokumen      | 48.500.000      | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                              | BKAD   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                          | 2 Dokumen      | 85.380.000      |                 |
|    | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                 | BKAD   | Jumlah data barang milik daerah yang berbasis sistem informasi                                           | 45 OPD         | 428.400.000     | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                 | BKAD   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                      | 44 Laporan     | 555.822.576     |                 |
|    | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                 | BKAD   | Jumlah dokumen/laporan inventarisasi barang milik daerah                                                 | 1 Dokumen      | 88.100.000      | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                 | BKAD   | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah                                          | 1 Laporan      | 90.000.000      |                 |
|    | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                    | BKAD   | Jumlah dokumen kepemilikan sebagai legalitas hukum atas barang milik daerah                              | 10 dokumen     | 995.600.000     | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                    | BKAD   | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                   | 10 dokumen     | 1.509.894.848   |                 |
|    | Penilaian Barang Milik Daerah                                                     | BKAD   | Jumlah dokumen penilaian barang milik daerah                                                             | 1 Dokumen      | 22.500.000      | Penilaian Barang Milik Daerah                                                     | BKAD   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 1 Dokumen      | 57.630.000      |                 |



| NO | RKPD                                                                                                    |        |                                                                                       |                |                 | Hasil Analisa Kebutuhan                                                                                 |        |                                                                                                                              |                |                 | Catatan Penting |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|    | Program / Kegiatan                                                                                      | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                     | Target Capaian | Kebutuhan Dana  | Program / Kegiatan                                                                                      | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                                                            | Target Capaian | Pagu Indikatif  |                 |
| 1  | 7                                                                                                       | 8      | 9                                                                                     | 10             | 11              | 2                                                                                                       | 3      | 4                                                                                                                            | 5              | 6               | 12              |
|    | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | BKAD   | Jumlah dokumen penggunaan, pemanfaatan, penilaian dan penghapusan barang milik daerah | 6 Dokumen      | 386.200.000     | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | BKAD   | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 6 Dokumen      | 164.040.000     |                 |
|    | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | BKAD   | Jumlah dokumen rekonsiliasi barang milik daerah seluruh SKPD                          | 45 OPD         | 157.300.000     | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | BKAD   | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | 44 Dokumen     | -               |                 |
|    | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  | BKAD   | Jumlah dokumen laporan barang milik daerah (semester dan tahunan)                     | 2 Dokumen      | 81.100.000      | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  | BKAD   | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun                                                                              | 2 Laporan      | -               |                 |
|    |                                                                                                         |        |                                                                                       |                | 253.944.473.744 |                                                                                                         |        |                                                                                                                              |                | 253.552.136.933 |                 |



## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 25 tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2025 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan dari usulan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas.

Program rutinitas yang ada pada BKAD kab. Tanjung Jabung Barat berdasarkan Permendagri No 90 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam RPJMD tahun 2020-2025 dengan tema “INDONESIA BERPENGHASILAN MENENGAH TINGGI YANG SEJAHTERA, ADIL DAN BERKESINAMBUNGAN” melalui “PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI BERBAGAI BIDANG DENGAN MENEKANKAN TERBANGUNNYA STRUKTUR PEREKONOMIAN YANG KOKOH BERLANDASKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF DI BERBAGAI WILAYAH YANG DIDUKUNG OLEH SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING”. dengan 7 agenda pembangunan yang diantaranya yaitu pada point ke 3 yaitu “MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING”. Yang diselaraskan dengan misi ketiga RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu, “PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK UNTUK PELAYANAN PUBLIK”. Dengan tujuan “TERSELENGGARANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL”. Dengan salah satu sasarannya “MENINGKATKAN KINERJA PENGANGGARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH” dengan indikator “NILAI OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DENGAN PREDIKAT WTP”.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dapat memberikan pelayanan yang terbaik terutama dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah demi untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Meningkatnya kinerja perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun tujuan, sasaran, indicator dan target OPD selama 5 Tahun ditunjukkan pada tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| NO | TUJUAN                                                                                | SASARAN                                             | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN                                                                          | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN |                         |                         |                         |                         |                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|    |                                                                                       |                                                     |                                                                                                    | 2021                                     | 2022                    | 2023                    | 2024                    | 2025                    | 2026                    |
| 1  | Meningkatnya kinerja perencanaan, penganggaran , pengelolaan keuangan dan aset daerah | 1. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah | - Ketepatan waktu penetapan APBD<br>- ketersediaan kas/dana yang tepat waktu<br>- persentase hasil | Tepat waktu<br><br>100%                  | Tepat waktu<br><br>100% | Tepat waktu<br><br>100% | Tepat waktu<br><br>100% | Tepat waktu<br><br>100% | Tepat waktu<br><br>100% |

|  |  |                                                                                                         |                                                       |                      |                |                |                |                |                |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |  |                                                                                                         | sinkronisasi laporan keuangan OPD terhadap LKD        | 100%                 | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           |
|  |  | 2. Meningkatnya kinerja pengelolaan aset daerah                                                         | - Persentase hasil sinkronisasi BMD terhadap aset OPD | 100%                 | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           |
|  |  | 3. Meningkatkan kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah | - Nilai AKIP OPD<br>- Indeks kepuasan masyarakat      | 64,39(B)<br>82,39(B) | 65(B)<br>83(B) | 66(B)<br>84(B) | 67(B)<br>85(B) | 68(B)<br>86(B) | 69(B)<br>87(B) |

### 3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program disusun dengan memperhatikan Sub Bidang pada undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan perundangan – undangan.

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan perundang undangan.

SKPD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (dalam hal ini BKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun programnya bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi :

#### A. Program

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



### 3. PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH

#### B. Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
9. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
10. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
11. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Pengelolaan Barang Milik Daerah

#### C. Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
13. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
17. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
18. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

19. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
20. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
21. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
22. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
23. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
24. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
25. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
26. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
27. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
28. Koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank
29. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
30. Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
31. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
32. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
33. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
34. Penyusunan Standar Harga
35. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
36. Penatausahaan Barang Milik Daerah
37. Inventarisasi Barang Milik Daerah
38. Pengamanan Barang Milik Daerah
39. Penilaian Barang Milik Daerah
40. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk program kegiatan BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun Anggaran 2025, dapat diuraikan pada Tabel 3.3 sebagai berikut :



**TABEL 3.3**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat**  
**Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026**

| Kode<br>Rek |  | Program / Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                               | Rencana Tahun 2025   |                |                       | Sumber<br>Dana | Prakiraan Maju Tahun 2026 |                |                    |
|-------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------------------|----------------|--------------------|
|             |  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | Lokasi/Unit<br>Kerja | Target Capaian | Pagu Indikatif        |                | Target Capaian            | Pagu Indikatif |                    |
|             |  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                      |                | Sebelum<br>Pergeseran |                |                           |                | Sesudah Pergeseran |
| 1           |  | 2                                                                                        | 3                                                                                                                                                                               | 4                    | 5              | 6                     | 6              | 7                         | 8              | 9                  |
| 01          |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH                                          | Persentase Penyediaan Komponen<br>Penunjang Pelayanan Kantor                                                                                                                    | BKAD                 |                | 14.214.050.695        | 13.529.529.695 | APBD                      |                | 14.871.078.417     |
|             |  | Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                      | Tingkat pemenuhan dokumen Renstra /<br>Renja / Dpa / Evaluasi Renstra, Renja /<br>Lakip yang disusun dan dilaporkan                                                             | BKAD                 |                | 132.199.750           | 167.199.750    |                           |                | 132.199.750        |
|             |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                  | BKAD                 | 9 Dokumen      | 60.000.000            | 95.000.000     | APBD                      | 5 Dokumen      | 60.000.000         |
|             |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | BKAD                 | 7 Laporan      | 72.199.750            | 72.199.750     | APBD                      | 8 Laporan      | 72.199.750         |
|             |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | Tingkat pemenuhan dokumen Laporan<br>keuangan tahunan OPD                                                                                                                       | BKAD                 |                | 8.407.654.445         | 8.082.091.445  | APBD                      |                | 8.784.182.167      |
|             |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                        | Jumlah Orang yang Menerima =Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                           | BKAD                 | 41 Orang/bulan | 7.430.554.445         | 7.119.255.445  | APBD                      | 41 Orang       | 7.802.082.167      |
|             |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas<br>ASN                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan<br>Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                           | BKAD                 | 12 Dokumen     | 855.000.000           | 876.736.000    | APBD                      | 12 Dokumen     | 860.000.000        |
|             |  | Pelaksanaan Pentausahaan dan<br>pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                       | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                          | BKAD                 | 12 Dokumen     | 36.000.000            | -              | APBD                      | 12 Dokumen     | 36.000.000         |
|             |  | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan<br>Pemeriksaan                                 | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan<br>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                                     | BKAD                 | 2 Dokumen      | 86.100.000            | 86.100.000     | APBD                      | 2 Dokumen      | 86.100.000         |
|             |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                                             | Meningkatnya Disiplin Aparatur                                                                                                                                                  | BKAD                 |                | 200.000.000           | 150.000.000    | APBD                      |                | 210.000.000        |
|             |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapan                                                                                                                       | BKAD                 | 110 Paket      | 150.000.000           | 150.000.000    | APBD                      | 110 Paket      | 160.000.000        |
|             |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan<br>Pelatihan                                                                                       | BKAD                 | 5 Orang        | 50.000.000            | -              | APBD                      | 5 Orang        | 50.000.000         |
|             |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                       | Cakupan layanan adm umum OPD<br>meliputi 7 sub kegiatan (bernilai 100%)                                                                                                         | BKAD                 |                | 1.861.196.500         | 1.631.196.500  | APBD                      |                | 1.975.196.500      |



| Kode Rek |  | Program / Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                                                                      | Rencana Tahun 2025 |                |                    |                    | Sumber Dana | Prakiraan Maju Tahun 2026 |                |
|----------|--|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------------|----------------|
|          |  |                                                                   |                                                                                        | Lokasi/Unit Kerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif     |                    |             |                           |                |
|          |  |                                                                   |                                                                                        |                    |                | Sebelum Pergeseran | Sesudah Pergeseran |             | Target Capaian            | Pagu Indikatif |
| 1        |  | 2                                                                 | 3                                                                                      | 4                  | 5              | 6                  | 6                  | 7           | 8                         | 9              |
|          |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | BKAD               | 2 Paket        | 70.996.500         | 70.996.500         | APBD        | 1 Paket                   | 73.996.500     |
|          |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | BKAD               | 4 Paket        | 255.000.000        | 255.000.000        | APBD        | 4 Paket                   | 260.000.000    |
|          |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | BKAD               | 2 Paket        | 140.000.000        | 100.000.000        | APBD        | 3 Paket                   | 140.000.000    |
|          |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | BKAD               | 1 Paket        | 58.000.000         | 58.000.000         | APBD        | 1 Paket                   | 64.000.000     |
|          |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | BKAD               | 12 Dokumen     | 40.000.000         | 50.000.000         | APBD        | 12 Dokumen                | 40.000.000     |
|          |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumla Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | BKAD               | 500 Laporan    | 1.200.000.000      | 1.000.000.000      | APBD        | 60 Laporan                | 1.300.000.000  |
|          |  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                             | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | BKAD               | 12 Dokumen     | 97.200.000         | 97.200.000         | APBD        | 12 Dokumen                | 97.200.000     |
|          |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Tingkat Pemenuhan pengadaan BMD penunjang urusan OPD                                   | BKAD               |                | 500.000.000        | 1.569.042.000      | APBD        |                           | 500.000.000    |
|          |  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | BKAD               | 2 Unit         | -                  | 1.369.042.000      | APBD        | 0                         | -              |
|          |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | BKAD               | 10 Unit        | 500.000.000        | 200.000.000        | APBD        | 10 Unit                   | 500.000.000    |
|          |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                           | BKAD               |                | 1.593.000.000      | 1.210.000.000      | APBD        |                           | 1.649.500.000  |
|          |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | BKAD               | 20 Laporan     | 5.000.000          | 40.000.000         | APBD        | 12 Laporan                | 5.500.000      |
|          |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | BKAD               | 48 Laporan     | 760.000.000        | 760.000.000        | APBD        | 12 Laporan                | 780.000.000    |



| Kode<br>Rek |  | Program / Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                            | Rencana Tahun 2025   |                |                       |                    | Sumber<br>Dana | Prakiraan Maju Tahun 2026 |                 |
|-------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
|             |  |                                                                                                                                 |                                                                                                              | Lokasi/Unit<br>Kerja | Target Capaian | Pagu Indikatif        |                    |                | Target Capaian            | Pagu Indikatif  |
|             |  |                                                                                                                                 |                                                                                                              |                      |                | Sebelum<br>Pergeseran | Sesudah Pergeseran |                |                           |                 |
| 1           |  | 2                                                                                                                               | 3                                                                                                            | 4                    | 5              | 6                     | 6                  | 7              | 8                         | 9               |
|             |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                         | BKAD                 | 4 Laporan      | 828.000.000           | 410.000.000        | APBD           | 12 Laporan                | 864.000.000     |
|             |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                           | Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | BKAD                 |                | 1.520.000.000         | 720.000.000        | APBD           |                           | 1.620.000.000   |
|             |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan             | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya       | BKAD                 | 24 unit        | 270.000.000           | 340.000.000        | APBD           | 25 Unit                   | 270.000.000     |
|             |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                           | BKAD                 | 94 Unit        | 350.000.000           | 350.000.000        | APBD           | 90 Unit                   | 350.000.000     |
|             |  | Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                     | BKAD                 | 1 Unit         | 900.000.000           | 30.000.000         | APBD           | 1 Unit                    | 1.000.000.000   |
|             |  | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                             | Persentase pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku            | BKAD                 |                | 237.344.939.814       | 237.344.939.814    | APBD           |                           | 249.062.249.126 |
|             |  | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                               | Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah                                              | BKAD                 |                | 1.875.971.877         | 1.956.239.000      | APBD           |                           | 1.967.483.853   |
|             |  | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                          | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                     | BKAD                 | 2 Dokumen      | 262.282.266           | 250.000.000        | APBD           | 2 Dokumen                 | 275.396.379     |
|             |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                      | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                                 | BKAD                 | 2 Dokumen      | 261.738.956           | 276.000.000        | APBD           | 2 Dokumen                 | 274.825.903     |
|             |  | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | BKAD                 | 2 Dokumen      | 902.595.578           | 950.000.000        | APBD           | 2 Dokumen                 | 947.725.356     |
|             |  | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | BKAD                 | 2 Dokumen      | 274.393.800           | 280.239.000        | APBD           | 2 Dokumen                 | 285.826.875     |
|             |  | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan                                                                  | BKAD                 | 2 Dokumen      | 174.961.277           | 200.000.000        | APBD           | 2 Dokumen                 | 183.709.340     |
|             |  | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                | Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah                                              | BKAD                 |                | 853.133.597           | 835.786.743        | APBD           |                           | 860.904.922     |
|             |  | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                   | BKAD                 | 44 Dokumen     | 252.691.230,00        | 252.691.230,00     | APBD           | 44 Dokumen                | 254.321.496,00  |
|             |  | Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun                                       | BKAD                 | 44 SKPD        | 37.116.765,00         | -                  | APBD           | 44 SKPD                   | 37.356.228,00   |



| Kode<br>Rek |  | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rencana Tahun 2025   |                |                       |                    | Sumber<br>Dana | Prakiraan Maju Tahun 2026 |                |
|-------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------------------|----------------|
|             |  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lokasi/Unit<br>Kerja | Target Capaian | Pagu Indikatif        |                    |                | Target Capaian            | Pagu Indikatif |
|             |  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                | Sebelum<br>Pergeseran | Sesudah Pergeseran |                |                           |                |
| 1           |  | 2                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                    | 5              | 6                     | 6                  | 7              | 8                         | 9              |
|             |  | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BKAD                 | 44 Dokumen     | 116.027.134,00        | 240.000.000,00     | APBD           | 44 Dokumen                | 116.775.696,00 |
|             |  | Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BKAD                 | 44 Dokumen     | 32.736.000,00         | 32.736.000,00      | APBD           | 44 Dokumen                | 32.947.200,00  |
|             |  | Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                                                                                                                                                                                               | BKAD                 | 4 Dokumen      | 113.392.125,00        | 113.392.125,00     | APBD           | 4 Dokumen                 | 116.390.925,00 |
|             |  | Koordinasi dan Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | BKAD                 | 44 Dokumen     | 71.289.422,00         | -                  | APBD           | 44 Dokumen                | 71.749.353,00  |
|             |  | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas              | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas                                                                                                                                                                                                  | BKAD                 | 44 Laporan     | 30.434.963,00         | -                  | APBD           | 44 Laporan                | 30.631.318,00  |
|             |  | Koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                                                                                                                                                                                                       | BKAD                 | 44 Dokumen     | 76.967.388,00         | 76.967.388,00      | APBD           | 44 Dokumen                | 77.463.952,00  |
|             |  | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                                                                                                                                                                                       | BKAD                 | 44 Dokumen     | 57.111.969,60         | 70.000.000,00      | APBD           | 44 Dokumen                | 57.480.434,00  |



| Kode<br>Rek |  | Program / Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                         | Rencana Tahun 2025   |                |                       | Sumber<br>Dana  | Prakiraan Maju Tahun 2026 |                |                    |
|-------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|----------------|--------------------|
|             |  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           | Lokasi/Unit<br>Kerja | Target Capaian | Pagu Indikatif        |                 | Target Capaian            | Pagu Indikatif |                    |
|             |  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                      |                | Sebelum<br>Pergeseran |                 |                           |                | Sesudah Pergeseran |
| 1           |  | 2                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                         | 4                    | 5              | 6                     | 6               | 7                         | 8              | 9                  |
|             |  | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | BKAD                 | 4 Dokumen      | 32.097.400,00         | -               |                           | 4 Dokumen      | 32.304.480,00      |
|             |  | Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah                                                                                   | BKAD                 | 44 Orang       | 33.269.200,00         | 50.000.000,00   | APBD                      | 44 Orang       | 33.483.840,00      |
|             |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                            | Terlaksananya koordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah                                                                              | BKAD                 |                | 1.272.130.405         | 1.272.130.405   | APBD                      |                | 1.222.992.200      |
|             |  | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset. Kewajiban. Ekuitas. Pendapatan. Belanja. Pembiayaan. Pendapatan-LO dan Beban                                                | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                      | BKAD                 | 24 Dokumen     | 215.105.880           | 215.105.880     | APBD                      | 24 Dokumen     | 236.616.438        |
|             |  | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD. BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                             | BKAD                 | 4 Laporan      | 248.622.570           | 248.622.570     | APBD                      | 4 Laporan      | 261.053.639        |
|             |  | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                 | BKAD                 | 1 Dokumen      | 401.201.955           | 401.201.955     | APBD                      | 1 Dokumen      | 421.262.053        |
|             |  | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                             | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                             | BKAD                 | 1 Dokumen      | 130.000.000           | 130.000.000     | APBD                      | 1 Dokumen      | 13.000.000         |
|             |  | Pembinaan Akuntansi. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                               | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina                                                                                                                    | BKAD                 | 88 Orang       | 277.200.000           | 277.200.000     | APBD                      | 88 Orang       | 291.060.000        |
|             |  | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                       | Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                     | BKAD                 |                | 233.343.703.935       | 233.280.783.666 | APBD                      |                | 245.010.868.131    |
|             |  | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                          | Jumlah laporan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan                                                                                       | BKAD                 | 4 Laporan      | 222.630.746.731       | 222.567.826.462 | APBD                      | 4 Laporan      | 233.762.284.057    |
|             |  | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                         | Terlaksananya pengelolaan anggaran belanja tidak terduga                                                                                                  | BKAD                 | 2 Laporan      | 6.264.651.696         | 6.264.651.696   | APBD                      | 2 Laporan      | 6.577.863.231      |
|             |  | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                                                                                    | Terlaksananya pengelolaan dana bagi hasil                                                                                                                 | BKAD                 | 4 Laporan      | 4.448.305.508         | 4.448.305.508   | APBD                      | 4 Laporan      | 4.670.720.733      |
|             |  | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                                                                                       | Persentase hasil sinkronisasi BMD terhadap aset OPD                                                                                                       | BKAD                 |                | 2.422.600.000         | 2.677.667.424   | APBD                      |                | 2.512.800.000      |
|             |  | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                               | -Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah<br>- Cakupan Pemenuhan Kartu Inventaris                                                                    | BKAD                 |                | 2.422.600.000         | 2.677.667.424   | APBD                      |                | 2.512.800.000      |
|             |  | Penyusunan Standar Harga                                                                                                                                      | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                                                                         | BKAD                 | 1 Dokumen      | 214.900.000           | 214.900.000     | APBD                      | 1 Dokumen      | 225.700.000        |



| Kode<br>Rek |  | Program / Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                            | Rencana Tahun 2025   |                |                       |                    | Sumber<br>Dana | Prakiraan Maju Tahun 2026 |                 |
|-------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
|             |  |                                                                                                         |                                                                                                                              | Lokasi/Unit<br>Kerja | Target Capaian | Pagu Indikatif        |                    |                |                           |                 |
|             |  |                                                                                                         |                                                                                                                              |                      |                | Sebelum<br>Pergeseran | Sesudah Pergeseran |                | Target Capaian            | Pagu Indikatif  |
| 1           |  | 2                                                                                                       | 3                                                                                                                            | 4                    | 5              | 6                     | 6                  | 7              | 8                         | 9               |
|             |  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                    | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                                 | BKAD                 | 2 Dokumen      | 48.500.000            | 85.380.000         | APBD           | 2 Dokumen                 | 51.000.000      |
|             |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                             | BKAD                 | 44 Laporan     | 428.400.000           | 555.822.576        | APBD           | 44 Laporan                | 437.000.000     |
|             |  | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah                                                                 | BKAD                 | 1 Laporan      | 88.100.000            | 90.000.000         | APBD           | 1 Laporan                 | 92.600.000      |
|             |  | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | BKAD                 | 10 dokumen     | 995.600.000           | 1.509.894.848      | APBD           | 10 dokumen                | 1.045.400.000   |
|             |  | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah                        | BKAD                 | 1 Dokumen      | 22.500.000            | 57.630.000         | APBD           | 1 Dokumen                 | 23.700.000      |
|             |  | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | BKAD                 | 6 Dokumen      | 386.200.000           | 164.040.000        | APBD           | 6 Dokumen                 | 390.100.000     |
|             |  | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | BKAD                 | 44 Dokumen     | 157.300.000           | -                  | APBD           | 44 Dokumen                | 162.100.000     |
|             |  | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun                                                                              | BKAD                 | 2 Laporan      | 81.100.000            | -                  | APBD           | 2 Laporan                 | 85.200.000      |
|             |  |                                                                                                         |                                                                                                                              |                      |                | 253.981.590.509       | 253.552.136.933    |                |                           | 266.446.127.543 |



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Renja Tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan perkiraan maju renja tahun 2024 , sehingga Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 .

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2025 , dimana Renja Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah, seluruh aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2025 .
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah.
5. Renja Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sesuai dengan Renja yang telah diuraikan diatas maka ada catatan penting yang perlu diperhatikan.

- Bahwa pelaksanaan dari Penyusunan Renja Tahun 2025 BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat telah berpedoman pada perkiraan maju renja tahun 2024.
- Optimalisasi kinerja semua bidang (pegawai) merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan dalam tupoksi di BKAD.
- Rencana tindak lanjut dari program BKAD tetap mengedepankan bekerja dengan baik dengan menerapkan prinsip transparan dan akuntabel.